

## Dinamika Eskalasi *Femicide* di El Salvador Terhadap Andil *Equal Measures 2030 (EM2030)* dalam Pengembangan Indeks Gender SDGs

Ambika Putri Swakartika Sari<sup>1</sup>, Y.A. Wahyudin<sup>1</sup>, Zulkarnain<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

[ambikakartikasari@gmail.com](mailto:ambikakartikasari@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research elaborates on the global issue of Femicide in El Salvador with the contribution of Equal Measures 2030 (EM2030) in responding to the SDGs agenda which will end in the next 10 years. This phenomenon indicates that "culture of violence" can be massively accepted and becomes an obstacle in achieving gender equality as the heart of the SDGs. EM2030 here is to answer the lack of gender data by developing the SDGs Gender Index in 6 target country for the EM2030 program including El Salvador. This research is a qualitative research. Library research is used as the data collection technique, in which secondary data is used and obtained from various sources such as books, journals, documents, agreements, official reports, policy statements, newspapers and other internet sources. Thus, this research will describe the Galtung Violence Trilogy concept to analyze the phenomenon of femicide in El Salvador which is strengthened by the NGO Advocacy concept in describing the EM2030 process affecting at the global, regional, national and grassroots levels through the NIP (National Influence Partner), Plan International El Salvador. The findings of this study indicate that the efforts made by EM2030 in developing the SDGs Gender Index as a guideline and benchmark for advocates, organizations, policy makers and civil society in El Salvador have helped reduce the number of femicide cases while contributing to the achievement of SDG 5 (Gender Equality), SDG 10 (Reducing Inequality), SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) and SDG 17 (Partnerships for the Goals).*

**Keywords:** El Salvador, EM2030, Femicide, SDGs, SDGs Gender Index.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengelaborasi antara isu global *Femicide* di El Salvador dengan andil *Equal Measures 2030 (EM2030)* dalam merespon agenda SDGs yang akan berakhir dalam 10 tahun kedepan. Fenomena ini menandakan bahwa "budaya kekerasan" diterima secara massif yang menjadi hambatan dalam mencapai kesetaraan gender sebagai jantungnya SDGs. EM2030 hadir untuk menjawab kurangnya data gender dengan mengembangkan Indeks Gender SDGs di 6 negara sasaran program EM2030 termasuk El Salvador. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka, dimana data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, perjanjian, laporan resmi, pernyataan kebijakan, surat kabar, artikel dan sumber internet. Sehingga, penelitian ini akan menjelaskan konsep Trilogi Kekerasan *Galtung* untuk menganalisis fenomena *femicide* di El Salvador yang diperkuat dengan konsep NGO Advokasi dalam menjabarkan proses EM2030 memengaruhi di tingkat global, regional, nasional hingga lokal di akar rumput melalui NIP (*National Influence Partner*) yaitu Plan Internasional El Salvador. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan EM2030 telah membantu menurunkan kasus *femicide* sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan), SDG 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh) serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

**Kata kunci:** El Salvador, EM2030, *Femicide*, Indeks Gender SDGs, SDGs.

## PENDAHULUAN

Sejarah kelam salah satu negara yang dikenal sebagai *the Land of Gangster* di Amerika Tengah yaitu El Salvador diwarnai dengan krisis dan resistensi akibat perang saudara atau *civil war* sejak tahun 1979–1992 (Human Rights Watch, 2019) menelan korban sekitar 70.000 orang meninggal dan banyak yang hilang. Konflik menempatkan perempuan dan anak-anak menjadi kaum yang rentan dimana pemerkosaan sistematis terhadap perempuan yang seringkali dimutilasi adalah bagian rutin dari kekerasan selama perang berlangsung (Huttner, 2020). Pasca konflik berakhir, efek domino dari normalisasi kekerasan dan tindak kriminal lainnya terus bergulir sehingga membudaya dan mengakar, terutama dalam konteks kekerasan geng (*gangster*), ditambah dengan institusi pemerintah yang korupsi.

Kompleksitas permasalahan negara tersebut dengan kekerasan dan brutalitas semakin meningkat imbas rivalitas dua gangster utama bernama *the Mara Salvatrucha* (MS-13) dan *Barrio 18* (18<sup>th</sup> Street). Terlebih dengan melekatnya budaya *machismo* yang lazim di kawasan ini, memicu berbagai efek domino seperti perdagangan narkoba, manusia khususnya perempuan dan anak-anak secara ilegal hingga pembunuhan. El Salvador menjadi negara dengan *the highest rate of homicide* di dunia dimana nomenklatur tersebut merujuk pada pembunuhan yang lebih netral gender. Sehingga, pembunuhan di El Salvador yang juga menargetkan perempuan kemudian dimaknai sebagai *femicide*: pembunuhan atau penghilangan nyawa perempuan yang berhubungan dengan identitas gendernya serta beratensi kebencian (*misoginistik*).

*“Femicide, for those unfamiliar with the term, is a hate crime. And it is predicated on the idea that a woman is killed because she is female. In El Salvador, a woman is murdered every 18 hours. In 2017, 468 Femicides occurred, according to the Institute of Legal Medicine. In 2018, the official number is over 300 – and growing.”* (Donovan, 2019).

Menurut studi *the Geneva Declaration on Armed Violence and Development* tahun 2015, El Salvador menjadi negara dengan angka tertinggi *gender-based killings of women (femicide)* di dunia (U.N. Women, 2013). Imbasnya, El Salvador pun akhirnya secara resmi menetapkan status darurat *femicide* dan melegalkan *A Comprehensive Law for a Life Free of Violence against Women* sejak tahun 2011. Dokumen tersebut didukung dengan pembentukan *The National Policy for Women’s Access to a Life Free of Violence*, pelaksanaan payung hukum dan regulasi yang jelas oleh Kejaksaan Tinggi El Salvador, serta adanya *Action Plans 2013 - 2015* dan *Action Plans 2016 – 2021* (OECD Development Centre, 2019), namun implementasinya masih terdapat bias gender.

Fenomena ini jelas menjadi penghalang utama bagi pencapaian kesepakatan 193 negara anggota PBB di seluruh dunia pada tahun 2015 hingga 2030 yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Jantung dari pelaksanaan rezim internasional yang memadukan 17 ambisi global dengan 169 sasaran terukur adalah kesetaraan gender. Terlebih dengan minimnya data gender yang ada untuk memenuhi komitmen transformatif dan komprehensif tersebut, maka *Equal Measures 2030* (EM2030) dibentuk untuk merespon kesenjangan data gender agar dapat memperkuat advokasi dan aksi melalui data dan bukti guna mengurangi kesenjangan bahkan ketidakadilan gender yang terjadi dalam konteks *femicide*.

Fokus utamanya ialah mengawal pencapaian SDGs dengan mengembangkan Indeks Gender SDGs yang berpatokan pada *advocacy based on data* untuk menemukan solusi bagi penghapusan kekerasan berbasis gender di masyarakat yang berada di akar rumput. Dalam penelitian ini adalah fenomena *femicide* di El Salvador yang kemudian menjadi salah satu negara sasaran program EM2030 dengan National Influence Partner (NIP) yaitu Plan International El Salvador. Sehingga, kolaborasi NGO berbasis advokasi ini dengan pemerintah El Salvador sendiri yang akan dibahas dalam tulisan ini agar pelaksanaan SDGs yang mengakui *'leaving no one behind'* dapat tercapai. Dengan demikian, EM2030 mengembangkan Indeks Gender SDGs salah satunya dipicu pula oleh adanya fenomena global yang terkonsentrasi dalam atmosfer salah satu negara *The Northern Triangle* di Kawasan Amerika Latin dan Karibia.

Berdasarkan selang pandang permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diangkat adalah “Bagaimana fenomena *femicide* mempengaruhi *Equal Measures 2030* (EM2030) dalam andilnya mengembangkan Indeks Gender SDGs untuk mereduksi atau mendegradasi *femicide* di El Salvador?”. Kemudian, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran atau andil EM2030 sebagai NGO yang mengembangkan Indeks Gender SDGs dalam merespon agenda global dengan jantungnya berada pada kesetaraan gender. Klausalitas antara isu global *femicide* di El Salvador sebagai negara sasaran program EM2030 sekaligus menjadi wadah dalam proses pengembangan hingga penerapan Indeks Gender SDGs menjadi fokus utama tulisan ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, artikel ilmiah berjudul *Generalized Violence as a Threat to Health and Well-Being: A Qualitative Study of Youth Living in Urban Settings in Central America's "Northern Triangle"* (De Jesus & Hernandez, 2019). Maria De Jesus dan Carissa Hernandez menghadirkan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap anak-anak muda terkait kekerasan di Kawasan Amerika Tengah. Penelitian ini merujuk pada sejarah kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut dikonseptualisasikan sebagai fenomena sistemik yang dihasilkan dan direproduksi melalui interaksi kompleks ketidakadilan struktural dan hubungan kekuasaan yang tidak setara. Hal tersebut selaras dengan penelitian ini mengenai kekerasan terhadap perempuan yang puncaknya berakhir dengan kematian, *femicide*.

Kedua, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Karen Musalo berjudul *El Salvador– A Peace Worse Than War: Violence, Gender, and a Failed Legal Response* (Musalo, 2018) yang berfokus pada pengeksplosian penjelasan mengenai Kekerasan Berbasis Gender (KBG) khususnya *femicide*. Dimana peneliti mengaitkannya dengan efektifitas 5 (Lima) kerangka hukum yang dibuat oleh pemerintah El Salvador sejak 1996 atau pasca perang saudara. Penelitian Karen Musalo menganalisis secara mendalam terkait situasi sebelum dan sesudah Perang Saudara atau konflik bersenjata di El Salvador, termasuk perkembangan *gangster* dan KBG terutama *femicide*.

Penelitian ini akan mencondongkan isu mengenai proses fenomena *femicide* di El Salvador bisa terjadi hingga kini dengan selang pandang mengapa kelima kerangka hukum yang telah disahkan belum menuai keberhasilan. Hal ini menjadi penghalang komitmen transformatif seluruh negara di dunia termasuk El Salvador yaitu

*Sustainable Development Goals* (SDGs). Maka dari itulah, penelitian Karen Musalo menjadi krusial bagi perkembangan tulisan ini karena dijadikan dasar pijakan terpilihnya El Salvador oleh EM2030 mengembangkan Indeks Gender SDGs dengan mengolah data untuk dijadikan sebuah acuan atau pedoman bagi proses advokasi di El Salvador untuk mencapai SDGs.

Ketiga, seluruh laporan global milik *Equal Measures 2030* (EM2030) yang dimulai pada 2018 hingga 2020. Laporan global tersebut memuat latar belakang serta maksud dan tujuan dari *Equal Measures 2030* (EM2030) yang terbentuk atas prakarsa dari 9 (Sembilan) mitra dari organisasi regional dan global terkemuka dari masyarakat sipil dan sektor pembangunan dan swasta dengan kepedulian untuk mengawal implementasi SDGs. Maka, EM2030 mengembangkan Indeks Gender SDGs sebagai sebuah alat yang dapat digunakan oleh para advokat kesetaraan gender agar dapat merubah keadaan jika terdapat gerakan bersama penyinaran isu-isu serius. Dampaknya, antar pemangku kepentingan di suatu negara bekerjasama agar perubahan menjadi kenyataan (A. Austin, personal communication, 20 January 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan makna di balik realita serta berpijak pada realita atau peristiwa yang berlangsung. Sehingga, alat pengumpul data dari pendekatan ini adalah peneliti itu sendiri yang juga disebut sebagai *human instrument* (Usman, 2014, p. 78). Berkenaan dengan hal tersebut, pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini bertalian erat dengan studi pustaka atau studi literatur (*Library Research*). Metode yang digunakan sifatnya eksplorasi literatur, referensi dan sumber rujukan yang didapatkan di ruang perpustakaan seperti buku, jurnal, dokumen, perjanjian, laporan resmi, pernyataan kebijakan, surat kabar, artikel maupun akses internet untuk menjangkau data dalam jaringan. Hal ini dikarenakan penulis belum dapat terjun langsung ke lokasi penelitian di El Salvador dan berpatokan pada hasil penelitian pihak-pihak yang telah turun langsung ke lapangan.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

### **TRILOGI KEKERASAN GALTUNG**

Johan Galtung merupakan sosiolog dan polemolog terkemuka dunia dan pakar studi perdamaian yang banyak terinspirasi dari Mahatma Gandhi dalam mewujudkan perdamaian. Pemikiran Galtung bermula melalui caranya memandang dunia dari bawah dan memahami bahwa dunia saat ini sedang dilanda banyak krisis (Galtung, 1980, p. 1). Adanya krisis kekerasan dan ancaman kekerasan, krisis penderitaan dan ancaman kemiskinan, krisis represi dan ancaman represi, hingga krisis di bidang lingkungan hidup dan ancaman kerusakan lingkungan berakar pada stuktur dunia (Windhu, 1992, pp. 2–3).

Pemikiran Galtung terkait kekerasan berkontribusi terhadap gerakan kaum feminis dalam upaya menumbuhkan kesadaran akan adanya kekerasan, penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Isu kekerasan menjadi penting karena selama ini perempuan yang menerima kekerasan sebagai mekanisme yang memproduksi subordinasi perempuan oleh laki-laki (Eriyanti, 2017, p. 28). Gagasan gender yang

patriarkis bisa menjadi kunci untuk produksi dan reproduksi kekerasan di semua tingkatan, imbas dari kekuasaan yang menghancurkan martabat manusia.

Konsepsinya Galtung yaitu kekerasan langsung, struktural dan kultural dimana kekerasan langsung berupa fisik atau verbal tampil sebagai perilaku yang tidak berubah, karena akarnya adalah struktur dan budaya. Kekerasan Langsung adalah peristiwa; Kekerasan Struktural adalah proses; Kekerasan Kultural adalah yang permanen pada keduanya. Rangkaian kekerasan tersebut dapat dilihat dalam hubungan timbal balik atau aksi–reaksi yang sangat erat diantara ketiganya (Makarim, n.d., pp. 12–13). Untuk itu, konsep ini dielaborasi dengan fenomena *femicide* di El Salvador.

## NGO ADVOKASI

Dinamika studi HI pasca Perang Dingin menjadi sebuah tantangan bagi politik internasional yang didasarkan pada peningkatan atensi terhadap perkembangan aktor-aktor baru non-negara (Non Governmental Organizations/NGOs) yang memungkinkan berkembangnya pusat-pusat kekuasaan di luar kerangka negara-bangsa. Kehadiran NGOs didorong pula oleh kegagalan negara dalam menyediakan layanan publik secara langsung dalam membangun sebuah sistem kolaborasi aksi yang lebih demokratis. Sistem tersebut akhirnya dapat berdampak positif secara massif dalam mengelola layanan publik bagi masyarakat sipil dari lokal, nasional hingga global (Ebrahim, 2003, p. 1).

Merebaknya NGOs merupakan fenomena yang dipicu oleh donor (*donor-driven*) dimana semakin besar bantuan resmi asing yang perlu direspon sehingga melahirkan studi dan kajian yang luas tentang NGOs di kalangan akademisi, praktisi hingga agen donor swasta dan resmi (Suharko, 2003, pp. 206–207). Kehadiran NGOs kini semakin dinamis dan kompleks disebabkan oleh adanya proses evolusi dari kelompok-kelompok kecil di tingkatan lokal menjadi organisasi multinasional dengan jaringan global. Selain itu, *working paper* berjudul *Working With NGOs: A Practical Operational Collaboration Between the World Bank and Non-governmental Organizations* juga membagi NGO ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu (Malena, 1995, pp. 14–15):

1. NGO Operasional: Tujuan utamanya adalah perancangan dan implementasi proyek pengembangan dengan menggerakkan sumber daya dalam bentuk keuangan, material atau tenaga relawan untuk menjalankan proyek dan program mereka. NGO operasional ini masih dapat dibagi atas 3 kelompok besar:
  - a. Organisasi berbasis masyarakat yang melayani suatu populasi khusus dalam suatu daerah geografis yang sempit;
  - b. Organisasi Nasional yang ber-operasi dalam sebuah negara yang sedang berkembang,
  - c. Organisasi Internasional yang pada dasarnya berkantor pusat di negara maju dan menjalankan operasi di lebih dari satu negara yang sedang berkembang.
2. NGO Advokasi: Tujuan utamanya adalah mempertahankan atau memelihara suatu isu khusus dan bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah atas isu tersebut. Pada dasarnya, peningkatan kesadaran dan pengetahuan dengan melakukan lobi, kegiatan pers dan kegiatan-kegiatan aktivis menjadi hasil akhir dari proses kinerja. Pelbagai studi kasus menunjukkan bahwa

NGO dan organisasi-organisasi akar rumput telah terlibat dalam membantu penguatan hak-hak sipil dan politik di masyarakat.

Pengalaman di lapangan (akar rumput) dari NGOs ditransmisikan ke tingkat nasional dan internasional, terkadang melalui konsultan asing atau staf dari NGO yang kemudian menjadi konsultan untuk organisasi lain, ataupun melalui upaya pemerintah dan penyandang dana internasional untuk menyebarkan serta mereplikasi pengalaman NGO (Ebrahim, 2003, p. 50), sehingga NGOs ditempatkan sebagai agen kunci yang didasarkan pada (Suharko, 2003, p. 209):

- a. NGOs memiliki keunggulan komparatif (dibandingkan dengan organisasi pemerintah dan bisnis), seperti fleksibilitas, pendekatan yang partisipatoris, terbiasa bekerja dengan organisasi dan komunitas akar rumput, kemampuan inovatif, kegiatan yang efektif, jaringan yang luas, dll;
- b. NGOs memiliki posisi sebagai lembaga antara atau *mediating structures* dan karenanya dianggap mampu menjadi jembatan kepentingan antara negara dan masyarakat;
- c. Proliferasi NGO diasumsikan akan menghasilkan masyarakat sipil yang kuat dan demokratisasi.

Berdasarkan penjabaran di atas, andil *Equal Measures 2030* (EM2030) sebagai NGO operasional khususnya juga NGO berbasis advokasi memiliki atensi khusus untuk menghubungkan data dan bukti dengan advokasi dan aksi guna mendorong kemajuan menuju kesetaraan gender. Tujuannya ialah merespon pencapaian agenda dunia yang dimulai pada tahun 2015 yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs) hingga tahun 2030 dimana jantung pelaksanaannya adalah kesetaraan gender. Penelitian ini berupaya untuk menemukan klausalitas antara puncaknya Kekerasan terhadap Perempuan yaitu *femicide* di El Salvador dengan EM2030 yang jaringan kemitraannya di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### KONSEPTUALISASI FENOMENA *FEMICIDE*

Istilah *femicide* dimunculkan oleh Diana E. H. Russell, Ph.D selama *proceedings* tulisannya di *the First International Tribunal on Crimes against Women* di Brussels, Belgia pada Maret 1976. Diana Russell memaknainya sebagai proses mengonseptualisasikan fenomena pembunuhan perempuan melalui identifikasi sirkumstansi kematian dan hubungan yang melekat antara penyintas (perempuan) dengan pembunuh (laki-laki) (Saccomano, 2015). Lambat laun, berbagai penelitian mengkaji *femicide* bermunculan untuk perbaikan pemahaman hingga kebijakan publik yang lebih baik.

Definisi *femicide* kemudian semakin berkembang di kalangan para aktivis, praktisi dan cendekiawan (Pinelo, 2015, pp. 52–54). *Femicide* juga berkontribusi mematahkan argumen bahwa kekerasan berbasis gender merupakan masalah privat dan personal karena nyatanya permasalahan ini berdimensi politik, sosial dan budaya (Gunadha, 2018). Kemudian, Simposium tentang *femicide* juga dilaksanakan pada tanggal 26 November 2012 di markas besar PBB di Wina, Austria dengan hasil penting berupa Declaration of the Vienna Symposium on Femicide. Berdasarkan deklarasi

tersebut, *femicide* adalah sebuah isu global yang tersaji secara bervariasi tentang pembunuhan perempuan dan anak perempuan oleh laki-laki dengan hubungan kekerabatan tertentu. *Femicide* dilakukan secara sengaja dan celakanya kejadian ini ditoleransi oleh aktor swasta maupun publik, diantaranya adalah: (United Nations Office on Drugs and Crimes, 2012)

1. Pembunuhan perempuan sebagai akibat dari kekerasan pasangan intim;
2. Penyiksaan dan pembunuhan misoginis terhadap perempuan;
3. Pembunuhan perempuan dan anak perempuan atas nama "kehormatan";
4. Menargetkan pembunuhan perempuan dan anak perempuan dalam konteks konflik bersenjata;
5. Pembunuhan terkait mahar wanita;
6. Pembunuhan perempuan dan anak perempuan karena orientasi seksual dan identitas gender mereka;
7. Pembunuhan perempuan dan gadis asli dan pribumi karena jenis kelamin mereka;
8. Pembunuhan bayi perempuan dan pemilihan jenis kelamin berdasarkan jenis kelamin;
9. Kematian terkait mutilasi genital (*Female Genital Mutilation/FGM*);
10. Tuduhan sihir; dan
11. Pembunuhan berbasis gender lainnya yang berhubungan dengan geng, kejahatan terorganisir, pengedar narkoba, perdagangan manusia, dan proliferasi senjata kecil.

Selain itu, Sidang Umum PBB telah mengadopsi 2 (Dua) resolusi mengenai *femicide* pada tahun 2013 (A/RES/68/191) dan tahun 2015 (A/RES/70/176) (Division for Policy Analysis and Public Affairs UNODC, 2019, p. 28) guna menguatkan penegakan hukum dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk yang paling ekstrem itu. Beberapa manifestasi dari *femicide* di atas telah diidentifikasi dari kasus-kasus yang banyak terjadi di Amerika Latin dan Karibia (Roth & Villa, 2012, pp. 15–16). Kawasan tersebut adalah manifestasi serius dari diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (Organization of American States (OAS) and Inter-American Commission of Women, 2008, p. 6) yang ditengarai adanya legitimasi budaya kekerasan pasca konflik di El Salvador sehingga berimplikasi terhadap eskalasi fenomena *femicide*.

Fenomena ini dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, baik di lingkup rumah tangga (domestik) maupun di komunitas (publik) sehingga kondisi *inequality* dan *insecurity* masih berlangsung hingga kini. Berbagai perwujudan atau bentuk dari pembunuhan terkait gender dilazimkan secara sosial dan budaya, sehingga, manifestasi *femicide* terus diterima, ditoleransi atau dibenarkan —dengan impunitas (keadaan tidak dapat dipidana, nirpidana) sebagai “norma” di El Salvador. Disini, *femicide* menjadi puncak dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan karena saratnya “budaya kekerasan” imbas Perang Saudara yang pernah terjadi.

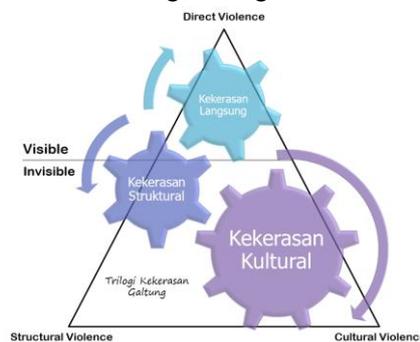
## MANIFESTASI TRILOGI KEKERASAN GALTUNG DALAM MEMAHAMI *FEMICIDE* DI EL SALVADOR

Berkaca dari konsepsi Galtung, penelitian ini memandang krisis kekerasan telah dan sedang terjadi sebagai isu global yakni fenomena *femicide* sebagai puncak

atau muara dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Galtung merumuskan arti kekerasan secara luas sebagai sesuatu penghalang yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar. Penghalang tersebut sebenarnya dapat disingkirkan, sehingga kekerasan juga bisa dihapuskan jika mengetahui penyebabnya (Eriyanti, 2017, p. 29). Galtung mengembangkan teori tentang kekerasan dalam kaitannya dengan teori perdamaian, karena kekerasan berbanding terbalik dengan perdamaian (Pinelo, 2015, pp. 63–64).

Galtung memperluas makna kekerasan menjadi 3 (Tiga) bentuk kekerasan, terlihat dalam Gambar 4.1: kekerasan langsung adalah peristiwa (*event*); kekerasan struktural adalah proses (*process*); dan kekerasan kultural adalah permanen pada keduanya (*invariation*) (Ramadhan, 2017, p. 84). Dalam penelitian ini, konsep mengenai ketiganya dinarasikan sebagai Trilogi Kekerasan Galtung dengan ilustrasi sebagai gerigi mesin yang bergerak bersama saling berkaitan. Galtung menyatakan bahwa kekerasan langsung dan kekerasan struktural “dibenarkan” atau “dilegitimasi” melalui kekerasan kultural yang mengakar didalam kedua kekerasan tersebut.

Gambar 4.1. Gerigi Trilogi Kekerasan Galtung



Sumber: Diolah Oleh Penulis

### ***Kekerasan Langsung***

Kekerasan yang merujuk pada tindakan agresi atau penyerangan yang dilakukan secara fisik oleh aktor individual (Galtung, 1969, p. 170). Aspek penguasaan (kuasa) disertai kekuatan (kuat) sebagai *previllage* yang dimiliki oleh laki-laki kemudian menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan yang dilakukan secara “*one on one*” antara laki-laki dan perempuan terjadi secara masif pada semua tingkatan sosial, baik dari keluarga hingga masyarakat.

Sejalan dengan pemetaan L. D. Eriyanti yang menggabungkan konsepsi kekerasan Johan Galtung dengan manifestasi ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan yang diilustrasikan oleh Mansour Fakih, maka kekerasan langsung terhadap perempuan dapat berupa kekerasan fisik dan psikologis yang dirasakan secara langsung oleh perempuan, berupa penyiksaan, serangan seksual, pelacuran, pornografi, pemaksaan KB dan *trafficking* (Eriyanti, 2017, p. 33). Pemerintah El Salvador yang reformis berhaluan kanan dianggap gagal menata kondisi negara sehingga memunculkan front kiri dengan membentuk militernya sendiri yakni Farabundo Martí National Liberation Front (FMLN). Semasa perang dingin, guna menghindari pengaruh komunis menyebar di Amerika Latin maka Amerika Serikat

mengirimkan 1–2 juta dollar per hari untuk mendukung militer pemerintah El Salvador. Namun, bagian mengerikan dari strategi militer yang didanai AS melawan FMLN adalah pemerkosaan dan penyiksaan brutal terhadap perempuan warga sipil. Dengan demikian, Perang Saudara El Salvador berkontribusi pada pola kekerasan gender ekstrem yang membentuk negara selama beberapa dekade mendatang (Huttner, 2020).

El Salvador menjadi negara dengan tingkat *femicide* tertinggi di dunia karena 1 perempuan El Salvador terbunuh oleh 1 laki-laki setiap 24 jam. Bahkan, menurut ISDEMU pada tahun 2017 setiap 18.7 jam seorang perempuan di El Salvador terbunuh; setiap 3 jam seseorang mengalami pelecehan seksual. Lebih dari 70% kasus yang menjadi penyintas adalah anak di bawah umur (Human Rights Council, 2018, p. 3). Lebih lanjut, statistik *femicide* yang ada pun gagal untuk mengakomodir perempuan dan anak perempuan yang hilang. Ketimpangan gender mengakibatkan dari relasi kuasa yang tidak setara menjadikan mereka termarginalisasi dan terus dieksploitasi oleh para *machistas*.

### ***Kekerasan Struktural***

Selain kekerasan langsung, Galtung menekankan bentuk lain dari kekerasan yang tidak mencelakai atau membunuh secara langsung, namun melalui struktur sosial yang menyebabkan kemiskinan, ketidakseimbangan ekonomi atau ketidakadilan sosial dan politik (Galtung, 1969, p. 170). Kekerasan struktural tidak dilakukan oleh individu tetapi tersembunyi dalam struktur yang lebih kecil maupun lebih luas. Penetrasi, segmentasi, marginalisasi dan fragmentasi sebagai bagian dari eksploitasi merupakan komponen penguat dalam struktur yang berfungsi menghalangi formasi dan mobilitas untuk berjuang melawan eksploitasi (Eriyanti, 2017, p. 30). Konteks kekerasan struktural dalam penelitian ini adalah ketidakadilan gender berupa izin sosial di masyarakat bahwa perempuan dan anak perempuan pantas dibunuh dan dimatikan potensi jasmani dan mental aktualnya. Dalam hal ini, *femicide* mencerminkan budaya kebencian dan diskriminasi terhadap perempuan (misogini) dan mengindikasikan kegagalan sistem peradilan pidana untuk menghukum para pelaku kejahatan ini (Roth & Villa, 2012, p. 14).

Fenomena global yang terkonsentrasi di El Salvador ini masuk kedalam manifestasi kekerasan struktural karena tidak terlihatnya momen-momen kekerasan sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini terjadi karena relasi kuasa yang tidak setara yang menjadi titik kunci bagi objektifikasi dan stigmatisasi perempuan. Stigmatisasi atas tubuh perempuan aklamasi kepemilikan hidupnya sebagai bagian dari eksploitasi yaitu penguasaan, pendayagunaan atau pemanfaatan perempuan –sebagai bagian utama dari kekerasan struktural. Penetrasi di masyarakat mengenai *femicide* dan banyak kekerasan terhadap perempuan lainnya hanya dianggap angin lalu dan memang wajar terjadi kepada perempuan dan anak perempuan. Inilah yang merupakan siklus normalisasi beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan di El Salvador dengan puncaknya ialah *femicide* yang diperkuat dengan adanya budaya *machismo* di El Salvador.

### **Kekerasan Kultural**

Kekerasan kultural Johan Galtung menceritakan tentang sesuatu yang seharusnya dilawan tetapi itu “membudaya” di masyarakat, imbas dari siklus normalisasi kekerasan terhadap perempuan. Galtung mendefinisikan kekerasan kultural sebagai sikap yang berlaku dan keyakinan yang telah diajarkan sejak kecil dalam kehidupan sehari-hari tentang kekuasaan dan kebutuhan kekerasan (Eriyanti, 2017, p. 30). Kekerasan kultural menyoroti cara bagaimana suatu tindakan kekerasan langsung dan kekerasan struktural dilegitimasi terlihat benar – atau setidaknya tidak salah dan dengan demikian, dapat diterima di masyarakat.

Disini, “budaya kekerasan” di El Salvador menjadi alasan utama eskalasi fenomena *femicide* sebagai normalisasi kekerasan terhadap perempuan sejak perang saudara selama 12 tahun berlangsung. Dimana pemerkosaan dan penyiksaan brutal terhadap perempuan dan anak perempuan warga sipil adalah bagian dari strategi perang (Huttner, 2020). Terlebih negara semakin melegitimasi budaya kekerasan masa lalu dengan praktik korupsi yang merajalela dan lembaga kepolisian yang bias gender di 2 (Dua) dekade pasca perang saudara selesai. Banyak feminis mengatakan bahwa *femicide* merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling ekstrem yang berasal dari rangkaian kekerasan dengan intensitas tinggi atau rendah dan terjadi secara sistemik dalam struktur kehidupan masyarakat yang patriarki. *femicide* tidak hanya terkait dengan bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan secara eksplisit, tetapi juga tindakan misogini sehari-hari yang berkontribusi terhadap penciptaan budaya seksisme dan devalorisasi perempuan serta kehidupan mereka (Pinelo, 2015, pp. 66–67).

Budaya *machismo* yang telah mengakar kuat dalam sistem masyarakat yang patriarki terejawantahkan secara riil sebagai kekerasan kultural yang melembaga pada aspek-aspek kebudayaan dan bidang-bidang simbolis dari keberadaan kita (Ramadhan, 2017, pp. 83–84). *Machistas* yang melekat pada diri laki-laki El Salvador sejak dilahirkan sudah didoktrin oleh keluarganya untuk mengimplementasikan budaya *machismo* (Viceland, 2016). Satu survey OXFAM tahun 2018 menemukan lebih dari setengah laki-laki muda El Salvador berusia antara 15–19 tahun percaya bahwa “perempuan menanggung hubungan kekerasan karena mereka percaya kekerasan dalam hubungan dengan laki-laki adalah normal” (Huttner, 2020).

Budaya kekerasan yang secara tidak langsung dilegitimasi oleh pemerintah El Salvador menyebabkan perempuan kehilangan kepercayaan kepada negara untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan yang berujung pada fenomena *femicide*. Ketidakhadiran negara dalam mengatasi permasalahan epidemik ini membuat celah antara pemerintah dan masyarakat terbuka semakin lebar. Celah tersebut diisi oleh non-governmental organizations (NGOs) untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di El Salvador. Terlebih dengan adanya *Sustainable Development Goals* (SDGs) sejak tahun 2015 yang mengikat secara moral negara-negara di seluruh dunia, termasuk El Salvador.

### **RESPON PENCAPAIAN AGENDA SDGs: EQUAL MEASURES 2030**

SDGs merupakan sebuah entitas rezim internasional yang bertujuan untuk menertibkan negara-negara di dunia melalui aturan, norma, dan struktur dalam bidang

isu tertentu yang disepakati bersama. Setelah melewati proses penancangan, perumusan hingga konseptualisasi yang terbuka, Sidang Umum PBB ke-70 di Markas Besar PBB New York, AS pada 25 September 2015 mengadopsi *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau dalam bahasa Indonesianya adalah *Mentransformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan* (Kartikasari, 2017, pp. 1–2). SDGs mulai berlaku sejak 1 Januari 2016 hingga Desember 2030 dimana pembangunan yang dilakukan perlu memperhatikan keseimbangan antar kelima prinsip SDGs (Kartikasari, 2017, pp. 1–4).

Sebanyak 193 negara di dunia sepakat memadukan 17 ambisi global dengan 169 sasaran dan 232 indikator yang memiliki jantung pada kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Hal ini dikarenakan masih adanya ketimpangan, ketidaksetaraan dan kesenjangan yang berimplikasi terhadap kekerasan terhadap perempuan sebagai sebuah pandemi yang mempengaruhi seluruh negara di dunia (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), 2016, p. 12). Maka dari itu, pencapaian setiap tujuan menekankan pada jantungnya SDGs yakni kesetaraan gender dan ‘tidak membiarkan satu orangpun tertinggal’ (*leaving no one behind*). Pencapaian kesetaraan gender menjadi penting guna kemajuan di seluruh tujuan dan target dimana kesetaraan gender sendiri berada di Tujuan 5 dan menjadi katalisator yang memicu efek penggandaan positif di seluruh spektrum pembangunan (Dugarova, 2018, pp. 7–8) karena kebijakan dan praktik yang menganggap normal diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan memperparah ketidakadilan yang terjadi.

Hubungan kritis antara ketidaksetaraan gender, kekerasan berbasis gender, konflik dan bencana menempatkan perempuan dan anak perempuan pada risiko tinggi kekerasan oleh aktor negara dan non-negara. Penjelasan di atas sangat relevan dengan penelitian ini yang mengambil studi kasus fenomena *femicide* di El Salvador. Konflik atau perang saudara sejak 1979 hingga 1992 dengan sengaja mengeksploitasi perempuan dan anak perempuan untuk diperkosa dan disiksa secara brutal. Meskipun konflik telah usai beberapa dekade yang lalu, namun normalisasi “budaya kekerasan” terus berlangsung hingga kini. Normalisasi budaya kekerasan terhadap perempuan akhirnya memicu tingginya kasus *femicide*, sehingga, fenomena ini membuat pelaksanaan SDGs di El Salvador terdistorsi dan belum diterapkan secara holistik dikarenakan adanya cara pandang patriarkis yang dipertebal oleh budaya *machismo* di El Salvador. Diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Ley contra la Violencia Intrafamiliar (LVI) [Law against Intrafamilial Violence] atau Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 1996; (Musalo, 2018, p. 48)
2. Amandemen hukum pidana (1999 and 2004); (Council of Ministers of Women of Central America and the Dominican Republic (COMMCA), 2018, pp. 104–105)
3. Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV or Integral Law) [Special Integral Law for a Life Free of Violence against Women] atau Hukum Komprehensif Khusus untuk Kehidupan yang Bebas dari Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2010; (Musalo, 2018, p. 48)
4. Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE or Law of Equality) [Law of Equality, Equity, and Eradication of Discrimination

against Women] pada tahun 2011 dan terbentuk Pengadilan Khusus yang menangani LEIV dan LIE; (Musalo, 2018, p. 48)

5. The Protocol for the Action on the Investigation of Femicide/ Protocolo de actuación para la investigación del feminicidio (5 Juni 2012) (Oficina Regional de las Naciones Unidas de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos - Fiscalía General de la República (OACNUDH-FGR), 2012)

Disini, ketidakhadiran negara dalam menangani kekerasan terhadap perempuan akhirnya menarik salah satu *platform* yakni *Equal Measures 2030* (EM2030) untuk memastikan pemerintah menepati janji mereka terkait kesetaraan hingga tahun 2030. Ambisi global tersebut perlu dipadukan dengan beragam aksi nyata guna menghindari stagnansi negara-negara dalam proses implementasi SDGs. Tantangannya adalah ketersediaan data dalam mengukur dan memantau kemajuan pencapaian seluruh tujuan SDGs sekaligus dapat mendorong akuntabilitas terhadap isu-isu kesetaraan gender.

Bias gender seringkali berakar pada cara kita mengukur/kegagalan mengukur berbagai aspek kehidupan dari seseorang (*Equal Measures 2030* & KAPAL Perempuan, 2018, pp. 4–5). Saat ini, kurang dari seperempat –dari 232 indikator yang digunakan oleh PBB untuk mengukur kemajuan SDGs secara eksplisit memilah data berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan, dari 53 indikator yang terkait khusus dengan gender hanya 15 indikator yang umumnya tersedia dengan penjabaran yang cukup memadai dalam melakukan pengukuran pencapaian SDGs (Buvinic & Swanson, 2017).

Ketersediaan data mengenai isu-isu yang memengaruhi perempuan dan anak perempuan di tingkat negara (aktor negara) kurang lebih atau kebanyakan tidak lengkap, sehingga, para pegiat kesetaraan gender secara global melalui Global Advocates Survey (Institut KAPAL Perempuan, 2017, p. 3) mengakui bahwa kesenjangan data gender pemerintah terjadi karena isu-isu tersebut tidak diprioritaskan atau tidak diakomodir secara utuh dalam setiap kebijakan pemerintah. Inilah yang menjadi alasan yang sangat relevan dengan tidak adanya data gender di tingkat negara. Oleh sebab itu, *Equal Measures 2030* (EM2030) sebagai suatu masyarakat sipil dan kemitraan yang dipimpin sektor swasta yang mandiri –membayangkan suatu dunia dimana setiap anak perempuan dan perempuan berharga dan dihargai. EM2030 menghubungkan data dan bukti dengan advokasi dan aksi untuk membantu mendorong kemajuan menuju kesetaraan gender. EM2030 percaya pada kesetaraan dan bertujuan untuk mengukur kemajuan menuju pencapaian SDGs tahun 2030.

Menurut wawancara dengan Justin Anthonie selaku Koordinator Advokasi Institut KAPAL Perempuan Jakarta, EM2030 sebetulnya merupakan nama dari sebuah *pilot project* yang dibentuk pada tahun 2016 atas prakarsa 9 (Sembilan) mitra inti, yaitu The African Women's Development and Communication Network (FEMNET), Committee for Latin America and the Caribbean for the Defense of Women's Rights (CLADEM), Asian-Pacific Resources and Research Centre for Women (ARROW) menjadi organisasi mitra EM2030 di tingkat regional yang tersebar pada 3 kawasan dunia, kemudian Bill & Melinda Gates Foundation, Data2X, Internasional Women's Health Coalition (IWHC), KPMG International, ONE Campaign, Plan International dan Women Deliver (J. Anthonie, wawancara, 15 January 2020). Menurut wawancara bersama J. Anthonie, profil *Equal Measures 2030* (EM2030) adalah sebagai berikut:

- a) Visi : Dunia dimana kesetaraan gender tercapai dan setiap anak perempuan dan perempuan berharga dan dihargai.\
- b) Misi : Mendorong kemajuan menuju kesetaraan gender dengan memastikan bahwa gerakan, advokat dan pembuat keputusan anak perempuan dan perempuan memiliki data dan bukti yang mudah digunakan untuk memandu upaya mencapai SDGs hingga tahun 2030 dan tidak meninggalkan siapapun.
- c) Pendekatan : *Equal Measures 2030* akan menyediakan pandangan independen dari kemajuan yang sedang dibuat (atau kekurangannya) untuk mendukung panggilan bertindak mengatasi kesenjangan data dan memastikan hak-hak anak perempuan dan perempuan tetap menjadi prioritas dalam pembangunan dan agenda kebijakan dalam mengejar SDGs.
- d) Nilai-nilai : Bekerja bersama-sama dan inovatif dengan berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk membuat transformasi mendalam yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesetaraan gender. EM2030 mandiri, berani, transparan, partisipatif, inklusif dan tangkas.
- e) Sasaran : Data dan Analisis, Berpengaruh di tingkat Nasional dan Berpengaruh di tingkat Global dan Regional.

EM2030 diresmikan oleh *core partners* lintas sektor untuk menyatukan sumber daya, keterampilan, jaringan dan ambisi kesepuluh mitra EM2030 untuk menggunakan data dan membawa wawasan, kisah dan aski yang baru dan kritis untuk membantu mencapai dampak kolektif bagi anak perempuan dan perempuan (*Equal Measures 2030*, n.d.). Mitra inti EM2030 memiliki kesamaan pandangan atau sefrekuensi untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang masih menjadi penghalang bagi pencapaian komitmen SDGs. Selain itu, EM2030 juga bekerja secara dekat dengan beragam organisasi untuk berkolaborasi daripada (melakukan) duplikasi dan mengumpulkan indikator SDGs yang resmi. Di antaranya adalah UN Women, UNICEF, dan organisasi PBB lainnya, negara, media massa, akademisi, sektor swasta dan lainnya untuk menjaga kesetaraan gender, data terkait gender, monitoring dan akuntabilitas pada agenda global 2030.

EM2030 juga menjadi saluran alternatif untuk menyampaikan aspirasi terkait kesetaraan gender, mempublikasikan sikap masyarakat atas persoalan ketidakadilan gender pada tingkat lokal, nasional, regional hingga global, melobi negara untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan kepentingan EM2030 dimana sesuai dengan jantungnya SDGs sebagai kelompok penekan di tingkat nasional. Sebagian dari tujuannya adalah memastikan data yang dibutuhkan tersedia sebagai panduan untuk mengarahkan kebijakan, hukum dan keputusan penganggaran yang dibuat oleh pemerintah dengan mengarusutamakan kesetaraan gender (*Equal Measures 2030*, 2019, p. ii). Untuk itu, EM2030 mengembangkan Indeks Gender SDGs sejak tahun 2017 di 3 (Tiga) kawasan dunia yakni Kawasan Amerika Latin dan Karibia (El Salvador dan Kolombia), Kawasan Afrika (Senegal, Kenya, dan Tanzania yang bergabung sejak tahun 2020), dan Kawasan Asia (India dan Indonesia).

#### PENGEMBANGAN INDEKS GENDER SDGs OLEH EM2030

EM2030 bekerja untuk memastikan gerakan perempuan dan anak perempuan, advokat dan pembuat keputusan memiliki data yang mudah digunakan dan bukti untuk

upaya mengawal pencapaian SDGs pada tahun 2030 (Holder & Lomelin, 2018). Maka dari itu, EM2030 memperkenalkan instrument baru pada tahun 2018 yakni Indeks Gender SDGs untuk memberi gambaran tentang kemajuan yang dialami perempuan dan anak perempuan serta mengukur apakah dunia berada pada jalur yang benar untuk mencapai kesetaraan gender sebagai jantungnya komitmen SDGs pada 2030. Indeks ini menjawab kebutuhan yang mendesak akan ketersediaan data tentang kesetaraan gender sekaligus mengindikasikan berbagai permasalahan yang “hilang” dan tidak tercermin secara memadai dalam data global yang tersedia saat ini. Kesenjangan data global biasanya mencerminkan kesenjangan data yang parah di tingkat nasional juga, sehingga pemantauan kesetaraan gender nasional sulit dilakukan di banyak negara (Institut KAPAL Perempuan, 2017, p. 2).

Indeks Gender SDGs dan instrument yang terkait –termasuk Pusat Data Advokasi Gender untuk berbagi data, bukti dan cerita tentang kesetaraan gender dan SDGs. Ini bersifat unik karena telah dikembangkan oleh kemitraan yang mencakup para aktor dari kalangan masyarakat sipil dan sektor swasta serta keterlibatan 6 negara sasaran program sekaligus modal pengembangan Indeks Gender SDGs didasarkan pada prinsip dan panduan berikut ini: (*Equal Measures 2030 & KAPAL Perempuan*, 2018, pp. 5–6)

1. Negara-negara tersebut memiliki beban tinggi terkait permasalahan SDGs terkait gender;
2. Negara-negara tersebut mewakili berbagai cakupan geografis, ukuran, populasi dan tingkat pendapatan;
3. Negara-negara tersebut dipandang memiliki ruang aman dimana masyarakat sipil dapat melakukan advokasi dan memberikan pengaruh dengan tingkat kebebasan tertentu;
4. Data dan analisis, serta investasi lebih lanjut terkait penggunaan dan aksesibilitas data akan menambah nilai upaya masyarakat sipil saat ini di negara-negara tersebut; dan
5. Negara-negara tersebut memiliki keberadaan mitra EM2030 dan jaringan advokasi dan koneksi yang kuat dengan para *decision maker* sehingga memungkinkan dilakukan pendekatan percontohan yang efektif.

Melalui gabungan keterlibatan beragam aktor dalam upaya kolaboratif dengan proses konsultasi serta penelitian di tingkat global, Indeks Gender SDGs terlahir sebagai indeks yang paling komprehensif mengulas dan mengupas tentang kesetaraan gender yang diselaraskan dengan SDGs yang dikeluarkan oleh PBB hingga saat ini. Terdapat dua fase pengembangan Indeks Gender SDGs oleh EM2030, yakni dalam iterasi pertamanya, Indeks Gender SDGs mencakup 43 indikator untuk 12 dari 17 tujuan SDGs dan awalnya diujicoba pada keenam negara sasaran EM2030 – termasuk El Salvador (*Equal Measures 2030 & KAPAL Perempuan*, 2018, p. 5). Interpretasi dari skor yang telah ditetapkan oleh EM2030 dalam Indeks Gender SDGs di iterasi pertamanya secara keseluruhan dan individu adalah skor relatif berdasarkan kinerja negara pada indikator yang dipilih.

Indeks Gender SDGs menggambarkan skor kesetaraan gender melalui *heat map* (peta panas) –skor negara yang semakin tua warna hijaunya berarti semakin tinggi kinerja negara tersebut pada indikator terkait gender dan berlaku sebaliknya.

Indeks Gender SDGs berupaya untuk menangkap berbagai masalah kesetaraan gender yang relevan di semua negara dan pada berbagai konteks yang berbeda. Keistimewaan Indeks Gender SDGs EM2030 antara lain: Sejalan dengan SDGs dan mencakup isu-isu dari hampir kesemua sasaran yang berjumlah 17 (tujuh belas); menggunakan campuran SDGs resmi dan indikator pelengkap untuk mengukur kemajuan; Menyertakan ukuran “*input*”, seperti misalnya adanya undang-undang, kebijakan, normal sosial, pengumpulan sumber daya dan pembiayaan, serta “*hasil*” atau keluaran; Hasil dalam skor komposit untuk membandingkan dengan kinerja negara-negara; Memberikan informasi baik bagi pendekatan berbasis hak maupun ekonomi; Berdasarkan konsultasi dengan para advokat dan pemangku kepentingan lainnya (mulai dari lokal hingga global); Tersedia dalam *platform online* yang mudah digunakan dan interaktif (Equal Measures 2030, n.d.).

Tentunya, EM2030 berpatokan pada *advocacy based on data* melalui jaringan kemitraannya yang luas dan universal. Indeks ini dimaksudkan sebagai data untuk mengamankan bukti kemajuan dan perubahan abadi untuk perempuan dan anak perempuan dalam proses pengawalan proses pencapaian SDGs hingga tahun 2030 mendatang. Kemudian, peluncuran Indeks Gender SDGs (SDG Gender Index) dan Pusat Data Advokasi Gender (Gender Advocates Data Hub) dilakukan pada tanggal 24 September 2018 –di samping Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Setelah dirilis secara resmi pada tanggal 24 September 2018, Indeks Gender SDGs kemudian disempurnakan berdasarkan masukan pada akhir tahun 2018 dan Indeks selengkapnya diluncurkan pada tahun 2019 dengan 51 indikator yang mencakup 14 dari 17 tujuan SDGs (Equal Measures 2030, 2019, p. 1) melingkupi 129 negara di dunia. Hal tersebut menjadi iterasi kedua dari pengembangan Indeks Gender SDGs oleh EM2030 dimana, daftar indikator yang ada pada Indeks Gender SDGs. Indeks Gender SDGs dan Pusat Data Advokasi Gender (Gender Advocates Data Hub) sebagai platform *online* interaktif yang menyatukan data global, regional dan nasional, ditujukan untuk ratusan advokat dan pembuat kebijakan SDGs terkemuka.

Indeks Gender SDGs merupakan titik awal bagi para pegiat di tingkat nasional: pemahaman penuh tentang hasilnya memerlukan kajian mendalam dari indikator, analisis dalam konteks negara dan kemampuan untuk menggali informasi secara mendalam, menggunakan data di tingkat nasional dan daerah untuk mengkaji hasil capaian bagi berbagai kelompok perempuan dan anak perempuan yang berbeda. Indeks Gender SDGs juga mengedepankan pelaksanaan dari CEDAW oleh setiap Negara yang telah meratifikasinya. El Salvador sejak 19 Agustus 1981 (United Nations Treaty Collection, n.d.) terus dipantau secara berkala terkait pelaksanaan konvensi tersebut oleh PBB.

Dalam penelitian ini, kesenjangan gender –bahkan lebih kepada ketidakadilan gender yang marak terjadi di El Salvador adalah *femicide* yang merupakan puncak dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Berdasarkan dari skor Indeks Gender SDGs sejak awal terbit sebagai percobaan di tahun 2018 hingga penyempurnaan Indeks Gender SDGs pada tahun 2019, El Salvador masih memiliki skor yang buruk terhadap pencapaian SDG 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh) tentunya berimplikasi pula pada SDG 5 (Kesetaraan Gender). Hal ini merupakan kinerja negara yang masih melegitimasi budaya kekerasan melalui impunitas dan melekatnya budaya *machismo* di El Salvador.

Meskipun pemerintah El Salvador telah aktif melakukan beberapa kebijakan untuk menangani “budaya kekerasan” yang berimbas pada fenomena *femicide*, hingga tahun 2019 masih terdapat 76 kasus baru yang dilaporkan oleh Kepolisian Nasional El Salvador dimana terdapat penurunan 31 persen kasus *femicide* dari tahun 2018. Kasus *femicide* sepanjang tahun 2019 tersebut adalah hasil dari bentuk kekerasan sosial dan kriminal yang terjadi di El Salvador (qcostarica.com, 2019). Maka dari itu, diperlukan pendekatan holistik secara massif dalam mereduksi, mendegradasi hingga penumpasan fenomena tersebut yang salah satunya adalah advokasi berbasis pada data dan bukti guna terwujudnya kesetaraan gender.

Indeks Gender SDGs yang digunakan dalam penelitian ini mengakomodir SDG 5, 10, dan 16. Hal ini sama dengan indikator SDGs yang dikeluarkan secara resmi oleh PBB yang menyangkut penelitian ini. Indikator dalam Indeks Gender SDGs yang ditebalkan menjadi perhatian, mengingat variabel dependen penelitian berupa fenomena *femicide* di El Salvador sebagai salah satu bentuk ketidaksetaraan gender tertera berikut:

- a. Tujuan 5 yaitu Kesetaraan Gender, mencakup:
  - Pernikahan anak, pernikahan dini dan pernikahan karena dipaksa
  - **Persepsi atas kekerasan (yang dilakukan oleh) pasangan**
  - Alasan hukum untuk aborsi
  - Perempuan di parlemen
  - Perempuan dalam peran kementerian
- b. SDG 10 yaitu Berkurangnya Kesenjangan, mencakup:
  - Rasio kesenjangan pendapatan
  - **Kebebasan dari diskriminasi**
  - Ratifikasi perjanjian (yang mengatur) migrasi
- c. SDG 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, mencakup:
  - Perdamaian dan institusinya
  - Cakupan sistem registrasi kelahiran
  - **Pembunuhan kepada perempuan**
  - **Keadilan untuk perempuan pada pengadilan tinggi**
  - **Pandangan tentang keterbukaan dan legitimasi negara**
- d. SDG 17 yaitu Kemitraan, mencakup:
  - Belanja pemerintah untuk bantuan sosial
  - Pendapatan pajak
  - Disagregasi anggaran nasional
  - **Keterbukaan terhadap statistik gender**

Maka dari itu, eskalasi fenomena *femicide* merupakan sebuah isu global yang jika dikontekstualisasikan di El Salvador juga menjadi sebuah isu krusial untuk dituntaskan. Tentunya, EM2030 hadir dengan data dan bukti yang menjadi landasan bagi advokasi dan aksi yang dilakukan oleh Plan Internasional El Salvador sebagai NIP beserta organisasi pejuang kesetaraan gender lainnya untuk dapat menggunakan data yang diberikan oleh EM2030 secara optimal. Khususnya untuk menekan para pelaksana kebijakan negara dan melindungi penyintas kekerasan di El Salvador

sebagai upaya menekan kenaikan tingkat kasus baru *femicide* melalui National Influence Partner (NIP) yaitu Plan Internasional El Salvador.

EM2030 memilih El Salvador karena tingkat kesenjangan gendernya cukup tinggi di dunia dengan NIP yaitu Plan Internasional El Salvador dan rencananya akan memilih mitra baru yang dimulai pada tahun 2020, namun belum ditentukan (A. Austin, personal communication, 20 January 2020). NIP bertujuan untuk *me-review* Indeks Gender SDGs yang sangat kuantitatif (sarat akan data statistik) yang ditemukan oleh tim EM2030 dengan cara menguatkannya melalui berbagai pengalaman, cerita dan realita di lapangan (kualitatif) mengenai kesetaraan gender di negaranya (J. Anthonie, wawancara, 15 January 2020), sehingga penguatan *local powers* di jaringan akar rumput sebagai sub penerima bantuan EM2030 pun terjadi dimana NIP sebagai penerima bantuan melalui pendanaan dan dukungan teknis dapat berkolaborasi secara aktif.

Plan Internasional telah bekerja di El Salvador selama lebih dari 40 tahun dalam mempromosikan hak anak-anak dan kesetaraan untuk anak-anak perempuan. Dalam dukungannya terhadap EM2030, Plan Internasional El Salvador memiliki program yaitu Girls and Women for Gender Equality yang bertujuan untuk memengaruhi pemerintah El Salvador agar memprioritaskan SDG 5 khususnya anak-anak dengan kekuatan data salah satunya melalui penggunaan Indeks Gender SDGs (*Equal Measures 2030 & KAPAL Perempuan*, 2018). Selain itu, NIP EM2030 di El Salvador ini memberikan edukasi dan pemahaman adil gender kepada anak-anak laki-laki dan perempuan di El Salvador.

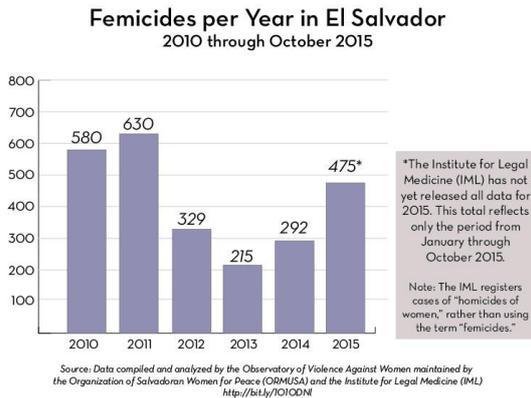
Selain itu, ISDEMU bekerja bahu membahu dengan mitranya EM2030 seperti Plan Internasional dalam memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, serta dalam mengurusutamakan kesetaraan gender dalam lembaga-lembaga negara, sehingga, pada gilirannya dapat memenuhi tujuan yang dipetakan oleh SDGs (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), 2020, p. 6). Selain itu, penguatan *local powers* lainnya dengan tujuan yang serupa dengan EM2030 dan mitra nasionalnya yaitu melalui ORMUSA (Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz) (Organizacion de Mujeres Salvadorenas por la Paz (ORMUSA), n.d.). Hal ini dimaksudkan bahwa gerakan advokasi yang dilakukan secara massif dan terstruktur dengan basis data dan bukti nyata di lapangan akan berimplikasi terhadap pencapaian SDGs pada tahun 2030.

Menurut Amanda Austin, EM2030 mengembangkan Indeks Gender SDGs sebagai alat yang kuat dan dapat digunakan oleh advokat serta aktivis kesetaraan gender untuk menerangi isu-isu serius seperti *femicide* agar pemerintah El Salvador dan masyarakat luas untuk membuat perubahan menjadi nyata (A. Austin, personal communication, 20 January 2020). Disini, indikator SDGs yang dikeluarkan oleh PBB ternyata telah terakomodir dan terwujud karena kehadiran EM2030 sebagai entitas NGO global dengan kemitraan kuat. Di samping mencapai Tujuan 5, 10 dan 16 yang bertalian erat dengan *femicide*, Tujuan 17 mengenai Kemitraan untuk Mencapai Tujuan juga telah dicapai EM2030 melalui langkah dan inisiatif yang dilakukannya di negara sasaran secara program serta upayanya mengembangkan Indeks Gender SDGs dan Pusat Data Advokasi Gender. Pasca kehadiran EM2030 yang dibentuk untuk merespon pencapaian agenda SDGs yang akan berakhir 10 tahun mendatang,

optimalisasi pelaksanaan regulasi di tingkat negara terjadi melalui Indeks Gender SDGs dan NIP EM2030 di El Salvador.

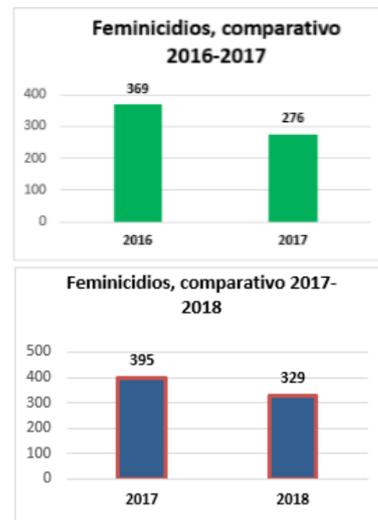
Angka kasus sebelum adanya hukum LEIV 2010, LIE 2011, The Protocol for the Action on the Investigation of Femicide 2012 dan tentunya sebelum SDGs dimulai tahun 2015 mengalami fluktuasi yang dapat dilihat pada Gambar 4.2. Sedangkan, setelah SDGs dimulai di tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami penurunan kasus *femicide* namun cenderung stagnan seperti diperlihatkan Gambar 4.3. Kurva mulai bergerak turun di tahun 2019 dengan mencatatkan 76 kasus baru berdasarkan laporan Kepolisian Nasional El Salvador dengan penurunan 31 persen kasus *femicide* dari tahun sebelumnya (qcostarica.com, 2019).

Gambar 4.2. Perbandingan *Femicide* di El Salvador tahun 2010-2015



Sumber: (Albaladejo, 2016)

Gambar 4.3. Grafik perbandingan *Femicide* 2016-2018



Sumber: (Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, n.d.)

Namun demikian, Presiden El Salvador yakni Nayib Armando Bukele Ortez (Nayib Bukele) yang terpilih melalui Pemilu pada 3 Februari 2019 lebih mengutamakan perbaikan kesejahteraan masyarakatnya melalui kebijakan ekonomi baru dan branding pemerintahan yang anti korupsi, sehingga investasi asing ini dapat membantu menciptakan peluang pekerjaan, meningkatkan pendidikan serta kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya, angka kriminalitas geng yang turut mempengaruhi *femicide* akan menurun seiring dengan rasa enggan rakyatnya untuk bermigrasi. Upaya denormalisasi *homicide* melalui kampanye *Instinct for Life* juga dapat dikatakan memiliki dukungan normatif yang kuat guna mencapai SDGs –khususnya SDG 16 dengan panggilan untuk mereduksi segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang menyebabkan kematian (Igarapé Institute, 2017, p. 5). *Homicide* juga termasuk memiliki pengaruh yang besar terhadap eskalasi kasus-kasus *femicide* di El Salvador.

Di samping itu, dibutuhkan layanan yang saling terkoordinasi di pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai muara untuk mengadili tindak kejahatan *femicide* di El Salvador. Masyarakat sipil pun patut berkontribusi dalam menumpas fenomena ini dengan cara memahami adil gender atau kesetaraan gender yang menjadi jantungnya SDGs. Hal itu dapat mengikis perlahan budaya *machismo* dalam struktur masyarakat

patriarkis melalui advokasi dan aksi yang berbasis pada data dan bukti, sehingga *femicide* sebagai muara atau puncak dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dihapuskan.

## KESIMPULAN

Pertama, kondisi pasca konflik (Perang Saudara) menimbulkan legitimasi “budaya kekerasan” hingga menjamurnya *gangs*/Maras –terutama rivalitas MS-13 dan Barrio 18. Rivalitas geng ini memberikan berbagai masalah lainnya, termasuk *femicide* dimana mayoritas dilakukan oleh pasangan intim. Hal ini terjadi karena budaya *machismo* yang melekat erat dalam struktur masyarakat patriarkis sebagai wujud dari “kekuasaan” yang melahirkan “kekerasan”. Ketidakadilan gender yang dialami perempuan dan anak perempuan di El Salvador sejatinya menjadi penghalang utama untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Kedua, pencapaian SDGs yang akan berakhir 10 tahun kedepan memerlukan sebuah pengukuran kemajuan yang komprehensif dalam skala yang massif. Maka dari itulah *Equal Measures 2030* (EM2030) hadir untuk mengisi kesenjangan data gender agar setiap perempuan dan anak perempuan dihitung dan diperhitungkan. Melalui jaringan kemitraan yang unik, EM2030 mengembangkan Indeks Gender SDGs sebagai acuan, pedoman, dan tolak ukur bagi advokat, organisasi, pembuat kebijakan hingga masyarakat sipil untuk menguatkan aksi dan advokasi yang dilakukan pada fenomena *femicide* dengan menekan pemerintah El Salvador melalui NIP untuk mencapai seluruh tujuan SDGs terutama pada tujuan 5, 10, dan terutama tujuan 16.

Ketiga, EM2030 menanggapi eksalasi *femicide* sebagai *obstacle* yang harus dihilangkan agar SDGs bukan hanya menjadi wacana semata. Untuk itu, EM2030 menjalankan programnya dengan NIP yaitu Plan Internasional El Salvador. NIP yang diberikan dukungan pendanaan secara langsung oleh EM2030 juga secara bebas dan bertanggungjawab dapat menyebarkan pengaruh “menuju kesetaraan gender 2030” maupun penggunaan Indeks Gender SDGs dengan organisasi lainnya. Hal ini berhasil menurunkan angka kasus *femicide* melalui pelaksanaan kebijakan anti bias gender serta upaya mengikis budaya *machismo* di El Salvador.

## REFERENSI

- Albaladejo, A. (2016). *How Violence Affects Women in El Salvador*. <https://www.lawg.org/how-violence-affects-women-in-el-salvador/>
- Buvinic, M., & Swanson, E. (2017, September 18). *Where are the Gender Data? Three Steps to Better Data and Closing Gaps*. Center for Global Development. <https://www.cgdev.org/blog/where-are-gender-data-three-steps-better-data-closing-gaps>
- Council of Ministers of Women of Central America and the Dominican Republic (COMMCA). (2018). *Regional Policy on Equity and Gender Equality of the Central American Integration System PRICE/SICA 2014-2025*. <https://www.sica.int/download/?119172>
- De Jesus, M., & Hernandez, C. (2019). Generalized Violence as a Threat to Health and Well-Being: A Qualitative Study of Youth Living in Urban Settings in Central America’s “Northern Triangle”. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(18), 3465. <https://doi.org/10.3390/ijerph16183465>
- Division for Policy Analysis and Public Affairs UNODC. (2019). Global Study on

- Homicide 2019. In *United Nations Office on Drugs and Crime*. <https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet1.pdf>
- Donovan, L. (2019, April 4). *Men Kill Women Because They Can: Inside El Salvador's Devastating Femicide Crisis*. Elle.Com. <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/4/femicide-in-latin-america%0A>
- Dugarova, E. (2018). *Gender Equality as an Accelerator for Achieving the SDGs*. UNDP and UN Women. <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender-equality-as-an-accelerator-for-achieving-the-SDGSs.html>
- Ebrahim, A. (2003). *NGOs and Organizational Change: Discourse, Reporting and Learning*. Cambridge University Press.
- Equal Measures 2030. (n.d.). *Dari Bukti Menjadi Aksi: Menciptakan Dunia Dimana Kesetaraan Gender Tercapai, dan Setiap Anak Perempuan dan Perempuan Berharga dan Dihargai*. <https://www.equalmeasures2030.org/wp-content/uploads/2017/06/2736-Brochure-INDONESIAN-web-version.pdf>
- Equal Measures 2030. (2019). *Harnessing the Power of Data for Gender Equality: Introducing the 2019 EM2030 SDG Gender Index*. [https://data.em2030.org/wp-content/uploads/2019/05/EM2030\\_2019\\_Global\\_Report\\_ENG.pdf](https://data.em2030.org/wp-content/uploads/2019/05/EM2030_2019_Global_Report_ENG.pdf)
- Equal Measures 2030, & KAPAL Perempuan. (2018). *Data Driving Change: Introducing the EM2030 SDG Gender Index*. <https://data.em2030.org/wp-content/uploads/2018/09/EM2030-2018-Global-Report.pdf>
- Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 27–37. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.18196/hi.61102>
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. [http://www2.kobe-u.ac.jp/~alexroni/IPD\\_2015\\_readings/IPD\\_2015\\_7/Galtung\\_Violence,Peace,andPeaceResearch.pdf](http://www2.kobe-u.ac.jp/~alexroni/IPD_2015_readings/IPD_2015_7/Galtung_Violence,Peace,andPeaceResearch.pdf)
- Galtung, J. (1980). *The True Worlds: A Transnational Perspective*. The Free Press.
- Gunadha, R. (2018, August 11). *Femicide, Mereka Dibunuh karena Berkelamin Perempuan*. Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2018/08/11/200117/femicide-mereka-dibunuh-karena-berkelamin-perempuan>
- Holder, A., & Lomelin, J. (2018). *Partner Meeting –Indonesia* [PowerPoint Slides].
- Human Rights Council. (2018). *Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on her mission to El Salvador*. <https://digitallibrary.un.org/record/1663022?ln=en>
- Human Rights Watch. (2019). *Country Report*. <https://www.hrw.org/world-report/2019%0A/country-chapters/el-salvador%0A>
- Huttner, S. (2020, March). *El Salvador's Femicide Crisis*. The Yale Review of International Studies. <http://yris.yira.org/essays/3794>
- Igarapé Institute. (2017). *Latin America can Reduce Homicide by 50 Percent in 10 years*. <https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2017/08/11-08-2017-Campanha-Instinto-de-Vida-EN.pdf>
- Institut KAPAL Perempuan. (2017). *Penjelasan Singkat Laporan Data Mendorong Perubahan: Pengenalan Indeks Gender SDG di Indonesia*.
- Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). (2020). *Resolución ISDEMU-2020-0002*. <https://www.transparencia.gob.sv/institutions/instituto-salvadoreno-para-el-desarrollo-de-la-mujer/documents/resoluciones-de-solicitudes>
- Kartikasari, D. (2017). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). In *Semai untuk Keadilan dan Demokrasi* (3rd ed.). Koalisi Perempuan Indonesia. [http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2018/01/Semai\\_TPB\\_SDGS.pdf](http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2018/01/Semai_TPB_SDGS.pdf)

- Makarim, M. (n.d.). *Memaknai "Kekerasan"*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Malena, C. (1995). *Working With NGOs: A Practical Operational Collaboration Between the World Bank and Non-governmental Organizations*. Operation Policy Departement, World Bank. <http://documents1.worldbank.org/curated/en/814581468739240860/pdf/multi-page.pdf>
- Musalo, K. (2018). El Salvador - A Peace Worse than War: Violence, Gender and a Failed Legal Response. *Yale Journal of Law & Feminism*, 30(1), 3–97. <https://digitalcommons.law.yale.edu/yjlf/vol30/iss1/1>
- Observatorio de Violencia Contra las Mujeres. (n.d.). *Arma de fuego, principal tipo de arma utilizada en los feminicidios de mujeres en el 2017 & PNC reporta 329 Feminicidios de enero a octubre 2018*. <http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/>
- OECD Development Centre. (2019). *Plan de Acción de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*. Social Institutions & Gender Index. <https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/SV.pdf>
- Oficina Regional de las Naciones Unidas de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos - Fiscalía General de la República (OACNUDH-FGR). (2012, July). *Protocolo de actuación para la investigación del feminicidio*. <http://oacnudh.org/wpcontent/uploads/2012/07/Protocolo-feminicidios-20042012-FIN%0AAL-2.pdf>
- Organizacion de Mujeres Salvadorenas por la Paz (ORMUSA). (n.d.). ORMUSA. <http://ormusa.org/>
- Organization of American States (OAS) and Inter-American Commission of Women. (2008). *Declaracion on Femicide: Mechanism to Follow up Convention of Belém do Pará (Mesecvi) Committee Of Experts On Violence (CEVI)*. <https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/declaracionfemicidio-en.pdf>
- Pinelo, A. L. (2015). *A Theoretical Approach to the Concept of Femicide/ Feminicide*. Universiteit Utrecht.
- qcostarica.com. (2019, April 5). *El Salvador: 76 Femicides So Far in 2019*. <https://qcostarica.com/el-salvador-76-femicides-so-far-in-2019/>
- Ramadhan, F. R. (2017). "Kekerasan itu Katarsis dari Patriarki!": Resistensi pada Kekerasan terhadap Perempuan dalam Praktik Gerakan Sosial Aliansi Laki-laki Baru. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 2(2), 80–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/ai.v38i2.8773>
- Roth, F., & Villa, A. V. (Eds.). (2012). Defining "femicide" and "feminicide." In *Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of Women (Femicide/Feminicide)*. OHCHR & UN Women. [https://eurogender.eige.europa.eu/system/files/events-files/latin\\_american\\_protocol\\_for\\_investigation\\_of\\_femicide.pdf](https://eurogender.eige.europa.eu/system/files/events-files/latin_american_protocol_for_investigation_of_femicide.pdf)
- Saccomano, C. (2015). *The Causes of Femicide in Latin America Barcelona* (Student Paper Series Institut Barcelona Estudis Internacionals). [https://www.ibei.org/ibei\\_studentpaper24\\_71980.pdf](https://www.ibei.org/ibei_studentpaper24_71980.pdf)
- Suharko. (2003). NGO, Civil Society dan Demokrasi: Kritik atas Pandangan Liberal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 205–226. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.11072>
- U.N. Women. (2013, April 4). *Femicide in Latin America*. <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/4/femicide-in-latin-america>
- United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women). (2016). *Women and Sustainable Development Goals*. UN Women Eastern and Southern Africa Regional Office. <https://africa.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/03/women-and-sustainable-development-goals>

- United Nations Office on Drugs and Crimes. (2012, November 26). *Symposium on Femicide: A Global Issue that Demands Action!*  
<https://www.unodc.org/unodc/ngos/DCN5-Symposium-on-femicide-a-global-issue-that-demands-action.html>
- United Nations Treaty Collection. (n.d.). *Chapter IV Human Rights, 8. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.*  
[https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\\_no=IV-8&chapter=4&lang=en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en)
- Usman, H. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.
- Viceland. (2016, June 9). *The Violent Machismo Culture in El Salvador: WOMAN (Exclusive)*. [Video]. Youtube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=NUaQD73KM0Q>
- Windhu, I. M. (1992). *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Percetakan Kanisius.